



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jln. Veteran No. 70, Eks Lap. Poliko. Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN : 2027
ANGGARAN

PROGRAM	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
---------	---

KEGIATAN	Administrasi Tata Pemerintahan
----------	--------------------------------

SUB KEGIATAN	Penataan Administrasi Pemerintahan
--------------	------------------------------------

KODE PROGRAM	4.01.02.
--------------	----------

ANALISIS SITUASI

1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan dibagi menjadi Urusan Absolut, Pemerintahan Umum dan Konkuren. Untuk urusan konkuren yang dibagi menjadi 2 yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Berbagai urusan yang telah dibagi berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kota/Kabupaten

Adapun untuk suksesnya berbagai urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dapat dilakukan dengan pembinaan yang dilakukan terhadap kelurahan. Dimana kelurahan merupakan pemerintahan terdepan yang paling dekat dengan masyarakat sebagai sasaran yang harus disejahterakan dalam berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Pembangunan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di kelurahan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi dan sawadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

Pembangunan masyarakat di kelurahan merupakan basis dari pembangunan daerah dan pembangunan Nasional perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah, agar kesenjangan masyarakat perkotaan tidak semakin melebar yang dapat berimplikasi terhadap timbulnya kecemburuan sosial bahkan disintegrasi bangsa.

Salah satu program strategi pemerintah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan serta mempercepat proses pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan yakni melalui kompetisi kegiatan perlombaan kelurahan.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan juga tidak terlepas dari peranan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Deasa serta Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga

	(RW), Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.		
	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Faktor Kesenjangan Belum optimalnya pengembangan sumber daya aparatur pemerintah kelurahan/ kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan sumber daya laki-laki lebih diutamakan untuk dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan di kelurahan dibandingkan sumber daya perempuan Penyebab Internal 1. Belum pahamnya konsep Gender pada masyarakat; 2. Adanya kesenjangan SDM, laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan strategis pada kepengurusan suatu organisasi. Penyebab Eksternal 1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, bahwa gender adalah hanya sebatas mendahulukan perempuan saja; 2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang strategis seperti menjadi kepala keluarga, pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, dll 3. Hasil konstruksi sosial budaya yang membedakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu		
CAPAIAN PROGRAM	Nilai LPPD		
JUMLAH ANGGARAN	Rp. 532.350.000,-		
RENCANA AKSI	Sub Kegiatan	Menyelenggaraan kelurahan berprestasi dengan penilaian komprehensif/ penilaian langsung di Kelurahan melibatkan langsung organisasi kemasyarakatan pada kelurahan.	
		Masukan	Rp. 532.350.000,-
		Keluaran	1. Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan; 2. Keikutsertaan semua organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan penilaian kelurahan tanpa melihat perbedaan gender
		Hasil	1. Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik; 2. Meningkatnya peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan penilaian kelurahan tanpa melihat perbedaan gender

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



Drs. RITA ANANDA, M.Si

NIP. 19680607 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jln. Veteran No. 70, Eks Lap. Poliko. Telp (0752) 92601, 92957 Fax (0752) 93279

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2027

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Program : Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan dibagi menjadi Urusan Absolut, Pemerintahan Umum dan Konkuren. Untuk urusan konkuren yang dibagi menjadi 2 yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Berbagai urusan yang telah dibagi berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kota/Kabupaten Adapun untuk suksesnya berbagai urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dapat dilakukan dengan pembinaan yang dilakukan terhadap kelurahan. Dimana kelurahan merupakan pemerintahan terdepan yang paling dekat dengan masyarakat sebagai sasaran yang harus disejahterakan dalam berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Pembangunan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di kelurahan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Salah satu program strategi pemerintah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan serta mempercepat proses pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan yakni melalui kompetisi kegiatan perlombaan kelurahan. Selain itu, upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan juga tidak terlepas dari peranan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Deasa serta Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.	Belum optimalnya pengembangan sumber daya aparatur pemerintah kelurahan/kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan sumber daya laki-laki lebih diutamakan untuk dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan dikelurahan dibandingkan sumber daya perempuan	1. Belum pahamnya konsep Gender pada masyarakat; 2. Adanya kesenjangan SDM, laki-laki lebih banyak yang menduduki jabatan strategis pada kepengurusan suatu organisasi.	1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, bahwa gender adalah hanya sebatas mendahulukan perempuan saja; 2. Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang strategis seperti menjadi kepala keluarga, pimpinan perusahaan, tokoh masyarakat, dll 3. Hasil konstruksi sosial budaya yang membedakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu	Dengan keikutsertaan kaum perempuan diharapkan dapat menampung aspirasi dari kaum perempuan	Menyelenggaraan kelurahan berprestasi dengan penilaian komprehensif/ penilaian langsung di Kelurahan melibatkan langsung organisasi kemasyarakatan pada kelurahan	input: Rp. 532.350.000,-	input: <i>Peserta Lomba Kelurahan Berprestasi</i>
Kegiatan: Administrasi Tata Pemerintahan							output: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	output: Keikutsertaan semua organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan penilaian kelurahan tanpa melihat perbedaan gender
Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan							outcomes: Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	outcomes: Meningkatnya peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan penilaian kelurahan tanpa melihat perbedaan gender
Tujuan : Meningkatnya partisipasi kepada kaum perempuan dalam proses pembangunan daerah								

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



Dis. FIDA ANANDA, M.Si

NIP. 1968/607 198809 1 001

